

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah merupakan suatu proses kontinyu sebagai hasil dari berbagai pengambilan keputusan di dalam ataupun yang mempengaruhi suatu wilayah (Sirojuzilam dan Bahri, 2014). Pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai arti peningkatan nilai manfaat wilayah bagi masyarakat suatu wilayah tertentu mampu menampung lebih banyak penghuni, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rata – rata membaik, disamping menunjukkan lebih banyak sarana/ prasarana, barang atau jasa yang tersedia dan kegiatan usaha – usaha masyarakat yang meningkat, baik dalam arti jenis, intensitas, pelayanan maupun kualitasnya (Sirojuzilam, 2008).

Pertumbuhan dan pengembangan suatu wilayah merupakan keharusan dalam mensejahterakan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur, maupun komunikasi. Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu kota, makatingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi (Huda dan Santoso, 2014). Menurut Pane., dkk (2013), aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah terdiri atas aspek fisik, sosial, ekonomi, sarana dan prasarana yang terdapat di wilayah tersebut, selain itu perkembangan suatu wilayah

dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah dimana masyarakat yang sejahtera dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pendapatan daerah tersebut.

Untuk penyesuaian ekonomi antar wilayah dalam suatu daerah, konsep pendekatan yang sering di pakai adalah konsep wilayah pengembangan daerah-daerah administratif. Setiap daerah atau kecamatan yang ada di setiap kabupaten dinilai memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan, selain itu tujuan dari pembagian kecamatan atau daerah di setiap kabupaten agar terjadinya pemerataan antar daerah.

Keseimbangan antar daerah, selain memenuhi tuntutan keadilan sosial, juga memungkinkan berlangsungnya perdagangan antar daerah yang berimbang. Perdagangan antar daerah yang berimbang adalah perdagangan yang efisien. Perdagangan yang efisien mendorong semakin intensifnya perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah yang intensif merangsang timbulnya “spesialisasi daerah” yang berarti membuka lagi kesempatan bagi masing - masing daerah untuk berkembang. Perdagangan yang berpijak pada “spesialisasi daerah” merupakan dasar bagi pertumbuhan nasional yang efisien.

Infrastruktur merupakan komponen dasar dalam perekonomian serta merupakan aspek utama dalam kondisi wilayah yang beragam. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek terpenting dalam mempercepat pembangunan wilayah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan perekonomian suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi.

Oleh karena itu sektor ini menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya (Sirojusilam, 2008).

Kabupaten Belu memiliki potensi pengembangan ekonomi yang sangat besar berbasis sumberdaya alam terutama pada sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan serta perikanan dan kelautan yang menghasilkan komoditas khas yang menjadi unggulan diantaranya dari sektor tanaman pangan yaitu komoditi padi, jagung dan kacang hijau; komoditas hortikultura/sayuran antara lain bawang merah. Pada sub sektor perkebunan telah memberikan nilai ekonomi potensial adalah tanaman jambu mete dan pinang. Sedangkan dari sektor peternakan yaitu sapi dan babi.

Kawasan industri dan perdagangan antar Negara adalah kawasan yang merupakan pintu perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokrat Timor Leste dengan salah satu kawasan pengembangannya meliputi Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Kakuluk Mesak dengan pusat pengembangan khusus perdagangan di Lakafehan (Desa Dualasi) dan Desa Kenebibi Kecamatan Kakuluk Mesak sebagai desa industri.

Ruang lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sedangkan peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah provinsi, kabupaten dan kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394) dengan persetujuan bersama. bp4d.belukab.go.id

Dilihat dari permasalahan diatas tentang pengembangan wilayah ataupun kabupaten belu melalui pusat pusat pertumbuhan ekonomi, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Pengembangan Wilayah Melalui Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Belu**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah penelitian ini dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana Pengembangan Wilayah Melalui Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Belu?
2. Apa Saja Yang Menjadi Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dan Bagaimana Kondisi Wilayah Pesisir Kabupaten Belu?
3. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengembangan Wilayah Melalui Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis wilayah melalui penentuan lokasi pusat-pusat pertumbuhan di daerah pesisir Kabupaten Belu. Dari tujuan penelitian adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Menambah pengetahuan terhadap pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir Kabupaten Belu.
2. Menambah Referensi Terkait Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dan Kondisi Wilayah Pesisir Kabupaten Belu
3. Mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengembangan Wilayah Melalui Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Belu

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai saran dan masukan bagi pemerintahan Kabupaten Belu terkhususnya 4 (empat) desa yang menjadi objek penelitian dalam penataan pengembangan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.
2. Sebagai bahan pertimbangan atau acuan pada penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.